

**EVALUASI TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS POKOK
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BONTOBAHARI
KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN**

SKRIPSI

NIRWAN



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**EVALUASI TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS POKOK
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BONTOBAHARI
KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI-SELATAN**

**NIRWAN
L23115507**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Studi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan

Nama : Nirwan

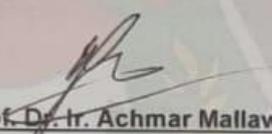
Stambuk : L231 15 507

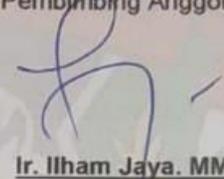
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Seminar Hasil Penelitian
dan disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, DEA


Ir. Ilham Jaya, MM

NIP. 195112221976031001

NIP. 195912221991031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan



Muhammad Zainuddin, S.Pi, M.Sc, Ph.D

NIP. 19710703 199702 1 002

Ujian Tanggal : 23 Februari 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirwan
NIM : L231 15 507
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul : "Evaluasi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).

Makassar, 12 Januari 2022



Nirwan
L231 15 507

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirwan
NIM : L231 15 507
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah satu seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diteruskan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 12 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis



Prof., Dr. Ir Achmar Mallawa, DEA.
NIP. 19511222 197603 1 001



Nirwan
L231 15 507

ABSTRAK

NIRWAN. L23115507. "Evaluasi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Bulukumba Sulawesi Selatan". Dibimbing oleh **Achmar Mallawa** sebagai pembimbing utama dan **Ilham Jaya** sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan menganalisis penyebab tidak berfungsinya fasilitas pokok PPI Bontobahari. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data sekunder diperoleh dari informasi dan laporan tertulis instansi terkait. Fasilitas pokok yang diamati sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2012. Tingkat pemanfaatan fasilitas pokok PPI Bontobahari meliputi dermaga, kolam pelabuhan, daratan pelabuhan dan kedalaman perairan dihitung menggunakan cara Merdekawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas pokok di PPI Bontobahari yaitu dermaga sebesar 87,56% atau pemanfaatan sangat tinggi, kolam pelabuhan sebesar 60,8% atau pemanfaatan sedang, daratan pelabuhan sebesar 21,81% atau pemanfaatan rendah, dan tingkat pemanfaatan kedalaman perairan sebesar 88,33% atau pemanfaatan sangat tinggi..

Kata kunci : PPI,fasilitas pokok, tingkat pemanfaatan, Bontobahari

ABSTRACT

NIRWAN. L23115507. "Evaluation of the Utilization Level of the Fish Landing Base (PPI) Bontobahari Bulukumba, South Sulawesi". Supervised by Achmar Mallawa as the main supervisor and Ilham Jaya as the member mentor..

This study aims to analyze the level of utilization of the existing basic facilities at Bontobahari Fsihing Port and analyze the causes of the non-functioning of the basic facilities.. This research uses case study method. Primary data was obtained through interviews with related parties and direct observation guided by the questionnaire. Secondary data is obtained from information and written reports from related agencies. The main facilities observed are in accordance with the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries number 8 of 2012. The utilization rate of Bontobahari fishing port basic facilities including the pier, harbor pool, harbor land and water depth is calculated using the Merdekawati method. The results showed that the level of utilization of the basic facilities at PPI Bontobahari, namely the pier of 87.56% or very high utilization, the harbor pool of 60.8% or medium utilization, the mainland harbor of 21.81% or low utilization, and the utilization rate into the waters. of 88.33% or very high utilization.

Key words : PPI, basic facilities, utilization rate, Bontobahari

BIODATA PENULIS



Nirwan , lahir pada tanggal 13 Agustus 1997 di Pinrang, Sulawesi Selatan. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan H.Nurdin dan Hj.Hasmia. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD 145 Pajalele pada tahun 2009, di SMP Negeri 2 Lembang pada tahun 2012, dan selanjutnya di SMA Negeri 8 Pinrang pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis berhasil di terima di Universitas Hasanuddin melalui Jalur Non Subsidi (JNS) dan tercatat sebagai mahasiswa di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selama menjalani perkuliahan, penulis juga aktif di organisasi Keluarga Mahasiswa Perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (KMP PSP) dan menjadi pengurus sebagai Anggota Kesekretariatan pada tahun 2016 - 2017, bergabung di UKM Mapala Perikanan Green Fish UH dan menjadi Kordinator Kesekretariatan pada tahun 2019 – 2020. Penulis juga sempat menjabat sebagai Dewan Hijau Mapala Perikanan Green Fish Unhas pada tahun 2020 - 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis senantiasa ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena curahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan” guna memenuhi salah satu kewajiban akademik dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **H.Nurdin** dan Ibunda **Hj.Hasmia** yang selalu memberikan dukungan, doa-doa keabaihan, rasa cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya, senang tiasa memberi pelajaran hidup dan selalu memberikan kesempatan dalam meraih pendidikan yang lebih baik. **Nutmiati, Narni** dan **Nasrul** selaku saudara penulis yang menjadi penyemangat untuk terus melangkah maju. Keluarga besar yang selalu menyemangati, memberikan doa, dukungan, dan nasihat baik kepada penulis.

Dengan rasa hormat dan penuh bangga penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof., Dr. Ir Achmar Mallawa, DEA** dan **Ir. Ilham Jaya, MM.** selaku pembimbing yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan Skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Metusalach., M.Sc.** dan **Dr.Nursinah Amir, S.pi., MP,** selaku penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyusun Skripsi.
3. Seluruh staf dan tenaga pengajar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan khususnya para dosen program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
4. Sahabat – sahabat penulis **Baso Aswar S.Pi, Herdin Nugraha Heppi S.Pi, Nurhidayat, Alwan Syahroni S.Pi,** yang selalu menemani, memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi.
5. Teman seperjuangan pengambilan data penelitian **Muh Fauzan A.S.**
6. Teman seperjuangan **M.Alwi** dan **Hikman Apriari**
7. Teman-teman **Mapala Perikanan Green Fish UH** yang selalu memberil dukungan, motivasi, dan solusi kepada penulis sejak awal menjadi anggota hinc _ penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi.
8. Sahabat – sahabat ku di **Rumah Karya** yang selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis, memberi kebahagiaan disetiap pertemuan.

9. Teman-teman seperjuangan **Kabut Rimba DIKSAR XVI GF UH** yang selalu setia menemani disegala medan perjalanan hidup kemahasiswaan baik susah maupun senang.
10. Teman-teman seperjuangan **angkatan 2015** jurusan perikanan khususnya program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang selalu memotivasi untuk terus melangkah.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat membantu para pembaca dalam perkembangan pendidikan. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dan semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya serta tetap berada dalam lingkaran kebaikan. Aamiin

Makassar, 12 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nirwan', written over a horizontal line.

Nirwan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Definisi Pelabuhan Perikanan	5
B. Pangkalan Pendaratan Ikan	7
C. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan Perikanan.....	8
D. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan.....	8
E. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas	11
F. Tingkat Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan	11
III. METODE PENELITIAN	14
A. Waktu Dan Tempat.....	14
B. Alat Dan Bahan.....	14
C. Metode Penelitian	15
D. Analisis Data	16
IV. Hasil Penelitian	22
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	22
B. Fasilitas Pokok PPI Bonto Bahari.....	23
C. Keragaman Fasilitas Pokok PPI Bontobahari Saat Ini.....	23
D. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok PPI Bontobahari	28
V. PEMBAHASAN	30
A. Pangkalan Pendaratan Ikan Bontobahari	30
B. Fasilitas Pokok PPI Bontobahari	30
C. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok PPI Bontobahari.....	32
D. Faktor Penyebab Tidak Berfungsinya Fasilitas Pokok PPI Bontobahari	34
VI. SIMPULAN DAN SARAN	35
A. Simpulan	35
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Kriteria-kriteria pelabuhan perikanan (PP) menurut SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.08/Men/2012 tentang Pelabuhan Perikanan.....	7
2. Alat dan Bahan	17
3. Metode penelitian.....	18
4. Penilaian tingkat pemanfaatan	20
5. Fasilitas pokok yang terdapat di PPI Bontobahari	23
6. Ukuran fasilitas PPI Bontobahari.....	29

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi penelitian	16
2. Layout Pangkalan Pendaratan Ikan Bontobahari.....	16
3. PPI Bontobahari	22
4. Layout PPI Bontobahari	23
5. Dermaga PPI Bontobahari.....	24
6. <i>Bollard</i>	24
7. Kolam pelabuhan dari arah dermaga	25
8. Kolam pelabuhan dari arah pantai.....	25
9. Kolam pelabuhan saat terjadi pendangkalan	26
10. Daratan pelabuhan.....	27
11. <i>Breakwater</i>	27

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Dermaga PPI Bonto Bahari	39
2. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Kolam Pelabuhan	41
3. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Kedalaman Perairan.....	41
4. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Daratan Pelabuhan	42
5. Dokumentasi Lapangan.....	43
6. Kuesioner yang digunakan	46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng (DKP Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>).

Di Sulawesi Selatan, sektor perikanan Kabupaten Bulukumba merupakan komoditi unggulan dalam MP3EI, dan merupakan penghasil terbesar se Sulawesi Selatan, dengan hasil produksi perikanan laut 53.555 ton/tahun dan perikanan tangkap 15.920 ton/tahun (BPS SULSEL 2016). Potensi perikanan yang sangat melimpah Kabupaten Bulukumba harus didukung dengan infrastruktur pemasaran yang memadai, saat ini infrastruktur Kabupaten Bulukumba memiliki 2 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu PPI Bontobahari dan PPI Kajang dimana salah satunya merupakan Zona Inti Minapolitan dan merupakan PPI terbesar di Kabupaten Bulukumba, yaitu PPI Kajang. Selain itu terdapat 5 Tempat Penjualan Ikan (TPI) yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang.

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk muat barang, kran - kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman kedaerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan-jalan kereta api, jalan raya atau saluran pelayaran darat. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan biasa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (Triatmodjo,1996).

Untuk memajukan kegiatan penangkapan ikan ditengah laut supaya hasilnya tetap memuaskan tanpa mengabaikan segi keselamatan, maka diperlukan prasarana di daratan berupa pangkalan pendaratan ikan (PPI). Pada tahap ini PPI tersebut hanya berupa dermaga, kemudian ada yang berkembang perlengkapannya dengan tempat untuk menjual dan mengolah ikan, dan sejak awal pelita II pemerintah memberik: anggaran pembangunannya guna lebih melengkapi fasilitas-fasilitas berbagai PPI antara

lain berupa pemecah gelombang, gedung pelelangan, kantor, jalan, kompleks, air bersih, pembangkit listrik dan lain-lain (Supabowo, 2000).

Menurut Lubis (2012), secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia sangat kompleks, mulai dari terbatasnya fasilitas yang ada, lemahnya pengelolaan, hingga kurang kompetennya sumberdaya manusia pengelola pelabuhan. Hal ini ternyata berimbas pada pendapatan pengguna jasa pelabuhan perikanan, terutama nelayan selaku pelaku utama usaha perikanan tangkap. Keterbatasan kapasitas fasilitas akan berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas kepelabuhanan sehingga fungsinya tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan perikanan tangkapnya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa panjang dermaga saat ini masih memungkinkan menampung kapal yang berlabuh, sedangkan kolam pelabuhan dan daratan pelabuhan masih memenuhi persyaratan, namun demikian kedalaman perairan untuk alur pelayaran keluar masuk kapal perlu ditambah melalui pengerukan perairan di sekitar PPI. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menempati posisi pertama untuk produksi perikanan tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahri merupakan salah satu pelabuhan Tipe D yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba. Mengingat peranan PPI yang sangat strategis, terutama dalam pengembangan usaha perikanan skala kecil atau tradisional, maka pengelolannya harus dilaksanakan secara professional agar masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat penuh dari keberadaan PPI.

Penelitian tentang tingkat pemanfaatan fasilitas pokok PPI memberikan hasil yang berbeda antara satu dengan lainnya. Arsyad (2012) melaporkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas pokok di PPI Bonehelang Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong rendah, berkisar 49,0 – 54% kecuali kedalaman perairan yang perlu pengerukan. Merdekawati (2019) melaporkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas pokok di PPI Lonrae Kabupaten Bone masih rendah, berkisar 26,0 – 45,5 %, kecuali panjang demarga yang perlu diperpanjang. Pradana (2014) melaporkan tingkat pemanfaatan fasilitas pokok di PPI Ponjalae Kota Palopo tergolong rendah sampai sedang, berkisar 49,9 – 71,8%. Rahayu (2016) juga mencatat tingkat pemanfaatan fasilitas pokok yang rendah terjadi di PPI Lanpulo Banda Aceh, kecuali dermaga. Sebaliknya, tingkat pemanfaatan fasilitas pokok yang tinggi terjadi pada PPI Tanjung Sari Pemalang yaitu berkisar 87 – 90%.

Tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungsari antara lain Tingkat Pemanfaatan Lahan sebesar 87 %, tingkat pemanfaatan alur pelayaran sebesar 89 %, tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 90 % dan tingkat pemanfaatan gedung pelelangan sebesar 83 %. (Ardandi, et.al 2013). Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo telah melampaui kapasitasnya dengan tingkat pemanfaatan fasilitas masing-masing 223,33%, 2.111,09%, 702%, 200%-400% (Pujiastuti, dkk 2018).

Melihat kondisi tersebut, maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian mengenai Studi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari Di Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan agar fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas pokok di PPI Bontobahari dapat difungsikan secara optimal untuk menunjang perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat pemanfaatan fasilitas pokok yang ada di PPI Bontobahari Kabupaten Bulukumba?
2. Apa saja fasilitas pokok yang ada di PPI Bontobahari Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pokok yang ada di PPI Bontobahari.
- b. Menganalisis penyebab tidak berfungsinya fasilitas pokok PPI Bontobahari.

2. Kegunaan

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan pelabuhan. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan di distribusikan (Lubis, 2006).

Departemen perhubungan menggolongkan pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang penggunaannya khususnya untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian dalam arti luas.

Adapun Departemen Perhubungan Laut mengartikan pelabuhan adalah suatu daerah tempat berlabuh dan atau tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang yang semuanya merupakan daerah lingkungan kerja aktivitas ekonomi, secara yuridis terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di pelabuhan tersebut (Lubis, 2012).

Dalam PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/2012 dimana Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. pelaksanaan kesyahbandaran; g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

- j. pemantauan wilayah pesisir;
- k. pengendalian lingkungan;
- l. kepabeanan; dan/atau
- m. keimigrasian.

2. Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat ikan;
- c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- h. wisata bahari; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelabuhan perikanan di Indonesia diklasifikasikan secara administratif menjadi 4 tipe berdasarkan pada jenis perikanan yang beroperasi (tradisional, semi industri atau industri). Tipe perikanan ini akan mencirikan ukuran kapal, daerah penangkapan, jumlah hasil tangkapan dan daerah distribusinya. Selain itu, pengklasifikasian pelabuhan perikanan juga didasarkan pada daya tampung kolam pelabuhan, produksi hasil tangkapan yang didaratkan dan daerah tujuan pemasarannya. Berdasarkan Kep No. 31 Tahun 2012 tentang Pelabuhan perikanan, maka pelabuhan perikanan diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pelabuhan perikanan nusantara (PPN/Tipe A)
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B)
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP/Tipe C)
- 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D),

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor Kep.8/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan membagi pelabuhan perikanan menjadi (pasal 6) :

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pelabuhan Perikanan Samudera merupakan pelabuhan perikanan tipe A, yang skal layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah perairan internasional.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Pelabuhan Perikanan Nusantara masuk kategori tipe B, yang skal layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pelabuhan Perikanan Pantai masuk kategori tipe C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pantai dan laut teritorial, dan bisa sampai ke wilayah laut ZEEI.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan masuk kategori tipe D, yang skala layanannya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan pantai dan perairan teritorial.

Berdasarkan tipe konstruksi pelabuhan perikanan dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu: pelabuhan perikanan alami, pelabuhan perikanan buatan, dan pelabuhan perikanan sungai.

Berdasarkan ukuran dan jumlah kapal yaitu : pelabuhan perikanan besar, pelabuhan perikanan menengah, dan pelabuhan perikanan kecil. Pelabuhan perikanan ukuran kecil dapat disebut : tempatambat (*moorage*). Berdasarkan daerah operasi pelabuhan perikanan dibedakan menjadi : pelabuhan perikanan laut lepas, pelabuhan perikanan pantai, pelabuhan perikanan transit, *forward fishing port*, dan *port of shelter*.

Berdasarkan jenis teknologi penangkapan ikan pelabuhan perikanan dibedakan menjadi : pangkalan mini trawl, pangkalan purse seine, pangkalan perikanan pancing dan sebagainya.

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan no. 08/Men/2012 tentang Pelabuhan Perikanan menetapkan kriteria-kriteria pelabuhan perikanan (PP) yang didasarkan kepada : daerah operasi kapal ikan yang memanfaatkan pelabuhan, kemampuan produksi industri perikanan, kemampuan tampung pelabuhan, luas lahan, tujuan pemasaran, keberadaan industri perikanan dan lainnya, mengklasifikasikan pelabuhan perikanan seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Kriteria-kriteria pelabuhan perikanan (PP) menurut SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.08/Men/2012 tentang Pelabuhan Perikanan

Tipe Pelabuhan	Kriteria-kriteria
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) / TIPE A	<ul style="list-style-type: none"> • melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan diwilayah perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas • memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT, • panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, • mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus, • memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 20 ha • ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor • terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari • terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) / TIPE B	<ul style="list-style-type: none"> • melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan diwilayah perairan Indonesia dan ZEEI • memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT, • panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, • mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus, • memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 10 ha • aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari • terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya

<p>Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)/ TIPE C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan diwilayah perairan indonesia • memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT, • panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m, • mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus, • memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 5 ha • aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per har • terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya
<p>Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/ TIPE D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan diwilayah perairan indonesia • memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT, • panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m dengan kedalaman kolam minus 1 m, • mampu menampung sekurang-kurangnya 15 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT kapal perikanan sekaligus, • memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 1 ha • aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per har

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penjelasan pasal 41, bahwa fungsi pelabuhan perikanan sebagai berikut:

1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan diarahkan untuk dapat menunjang kegiatan nelayan yang berbasis di pelabuhan perikanan tersebut, baik nelayan lokal maupun nelayan asing. Berbagai aktifitas nelayan yang berbasis di pelabuhan perikanan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nelayan.

2. Tempat berlabuh kapal perikanan

Pelabuhan perikanan dibangun sebagai tempat berlabuh dan tambat/merapat kapal-kapal perikanan yang akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain mendaratkan ikan (*unloading*), memuat perbekalan (*loading*), istirahat (*berthing*), perbaikan kapal (*docking*). Oleh karena itu prasarana pokok pelabuhan perikanan yaitu dermaga dan *docking* menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut

3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan diarahkan untuk dapat mengakomodasi kegiatan kapal ikan dalam mendaratkan hasil tangkapan (*unloading activities*). Untuk itu perlu dermaga dan lantai dermaga untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan segar agar kualitas ikan terjamin.

4. Tempat pelayanan dan memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Pelabuhan perikanan dipersiapkan untuk dapat mengakomodasikan dan melayani kegiatan-kegiatan kapal perikanan baik domestik maupun kapal ikan asing untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan melaut, pemasaran (ekspor dan domestik), menyimpan, mengolah hasil tangkapan dan sebagainya.

5. Pusat pelaksanaan pembinaan dan penanganan mutu hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan dilengkapi dengan lahan pengolahan/industri perikanan. Dalam lahan pengolahan/industry terdapat kegiatan pengolahan (*processing*), pengepakan (*packaging*) dan penyimpanan (*storage*) yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu para pengusaha perikanan.

6. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

Pelabuhan perikanan dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pemasaran Ikan (*Fish Market Center*) yang dapat menampung ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan dan atau ikan yang berasal dari daerah lain melalui kapal perikanan pengangkut (*fishing boat carrier*) atau jalan darat. Sebaliknya distribusi hasil tangkapan sampai kepada konsumen (domestik dan ekspor).

7. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan tempat penyuluhan dan pengumpulan data. Penyuluhan dapat dilakukan antara lain terhadap nelayan dan keluarganya dan para pedagang ikan. Sedangkan kegiatan pengumpulan data dilakukan misalnya data kapal perikanan (frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan ikan), data jumlah nelayan, data produksi ikan dsb.

8. Pusat pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan lapangan

Pelabuhan perikanan merupakan basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, Anak Buah Kapal (ABK), dokumen kapal ikan, hasil tangkapan ikan dan lainnya. Untuk pengawasan di laut dengan patroli laut, pelabuhan perikanan merupakan pangkalan keberangkatan para pengawas penangkapan ikan yang sedang bertugas. Untuk itu pelabuhan perlu dilengkapi dengan pos pelayan terpadu untuk pengawasan penangkapan ikan.

B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan pendaratan ikan ini untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai dan lokasinya tersebar diseluruh Indonesia.

Fungsi dan peranan pelabuhan menurut Baskoro (1984) dalam Fitriyah (2007) yaitu sebagai tempat untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan, pemasaran dan tempat berlabuh bagi kapal yang mengisi bahan bakar serta persiapan operasi penangkapan.

Lubis (1989) mengklasifikasikan pelabuhan perikanan berdasarkan jenis dan skala usahanya, yaitu:

1. Pelabuhan perikanan berskala besar atau perikanan laut dalam yaitu pelabuhan untuk perikanan industri atau untuk berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal penangkapan berukuran besar dengan panjang 40 sampai 120 meter berat >50 GT.
2. Pelabuhan berskala menengah yaitu pelabuhan untuk perikanan semi industri atau tempat berlabuh atau bertambahnya kapal-kapal penangkapan ikan berukuran 15 sampai 50 GT.
3. Pelabuhan perikanan berskala kecil yaitu pelabuhan untuk perikanan tradisional atau tempat berlabuh dan bertambahnya kapal-kapal penangkapan berukuran <15 GT.

C. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan mengacu pada keputusan menteri perikanan dan perundangan yang berlaku. Selain harus mengacu pada peraturan yang berlaku, fungsi Pelabuhan Perikanan juga harus disesuaikan dengan keadaan pelabuhan beserta potensi yang ada.

1. Peranan Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Sedangkan, menurut pendapat Lubis (2012) peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas antara lain :

- a. Tempat penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan.
- b. Mampu melakukan pembongkaran secara cepat dan penyelesaian ikan secara cermat.
- c. Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang, melalui aktivitas pelelangan ikan.

D. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:

- Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment), dan groin
- Dermaga
- Jetty
- Kolam pelabuhan
- Alur pelayaran
- Jalan komplek dan drainase; dan
- Lahan

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:

- Tempat pemasaran ikan (tpi)
- Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas
- Air bersih, instalasi bahan bakar minyak (bbm), es, dan instalasi listrik
- Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring
- Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu
- Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan
- Transportasi seperti alat-alat angkut ikan
- Kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (ipal), tempat pembuangan sementara (tps)
- Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan

c. Fasilitas Penunjang.

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:

- Balai pertemuan nelayan;
- Mess operator;
- Wisma nelayan;
- Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus (mck);
- Pertokoan; dan
- Pos jaga

Sementara fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi:

- a. Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
- b. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tpi, suplai air bersih, dan instalasi listrik;
- c. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan mck

Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal, baik waktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan.

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari :

a. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi sebagai tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan, serta tempat mengisi bahan perbekalan untuk keperluan penangkapan ikan di laut.

b. Kolam pelabuhan

Bagian perairan yang menampung kegiatan kapal perikanan atau bongkar muat, berlabuh, mengisi perbekalan dan memutar kapal disebut kolam pelabuhan. Batas kolam pelabuhan umumnya dibatasi oleh daratan, penahan atau batas administrasi pelabuhan.

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1991) kolam pelabuhan dalam pembuatannya harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Memiliki luas yang dapat menampung seluruh kapal yang berlabuh dan masih memberikan ruang yang leluasa untuk bergerak bagi kapal.
2. Lebarnya harus dapat digunakan oleh kapal yang berputar dengan bebas, kalau bisa merupakan gerak melingkar yang tidak terputus.
3. Perairannya cukup dalam sehingga kapal terbesar masih mampu untuk berlabuh di saat air sedang surut.
4. Tempatnya terlindungi dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya.

c. Pemecah gelombang (*Break water*)

Pemecah gelombang (*break water*) adalah suatu struktur bangunan laut yang berfungsi untuk pantai atau daerah disekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut melindungi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kolam pelabuhan. *Breakwater* sekaligus dapat membentuk kolam pelabuhan. Pemecah gelombang juga berfungsi untuk menahan sedimen dari sekitar pelabuhan (Lubis, 2012).

d. Daratan pelabuhan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1991), bagian darat yang menampung seluruh letak fasilitas pelabuhan disebut daratan pelabuhan. Luas daratan tersebut biasanya 2 - 4 kali luas seluruh fasilitas bilamana semuanya dibangun di atasnya. Penentuan luas daratan pelabuhan ini sebaiknya didasarkan pada perhitungan jangka panjang sehingga nantinya tidak menimbulkan kesulitan dalam perluasan wilayah pelabuhan.

Daratan pelabuhan perlu diberi ketinggian tertentu supaya tidak terendam pada saat air pasang atau disapu oleh gelombang. Ketinggian perlu juga untuk perencanaan *drainasse*. Tinggi daratan pelabuhan minimal 50 cm diatas air laut tinggi. Sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50 – 70 cm diatas pasang air laut tertinggi tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan tersebut.

e. Kedalaman Perairan

Kedalaman kolam perairan pada suatu pelabuhan perikanan juga sangat menentukan keamanan kapal dalam berlabuh khususnya pada saat permukaan air terendah. Kedalaman perairan ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: draft kapal besar dengan muatan penuh, tinggi gelombang maximum dalam kolam pelabuhan ($H_{max} = 50$ cm), tinggi ayunan kapal yang berlayar ($S = 10-30$ cm) dan *clearance* sebagai pengamanan antara lunas kapal dan dasar perairan antara 25-100 cm (Elfandi, 1995).

E. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas

Instansi pelabuhan perikanan (PPI) atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap. Dalam kegiatannya PP/PPI tidak terbatas pada masalah investasi pembangunan perangkat kerasnya saja, melainkan harus memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai masyarakat pengguna, dengan melaksanakan operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya.

Secara umum pelayanan dipelabuhan perikanan dapat dibedakan dalam dua kategori yakni pertama pelayanan yang bersifat langsung kepada nelayan atau pengusaha perikanan untuk menyediakan barang/jasa yang mereka butuhkan. dan yang kedua yaitu pelayanan kepada masyarakat umum didalam pelabuhan menggunakan metodologi yang bersifat massal agar mereka (nelayan serta pengusaha perikanan) lebih mampu memajukan usahanya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di pelabuhan (Muslimin, 2013).

F. Tingkat Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan perikanan, tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan (positif maupun negatif), baik didarat, perairan, maupun udara. Dampak adalah suatu usaha atau kegiatan, secara langsung maupun tidak langsung. Dampak juga diartikan sebagai suatu bentuk antara dua kepentingan atau perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sebagai akibat adanya aktivitas manusia (Lubis, 2012)

Dampak ekonomi dari pembangunan pelabuhan pemanfaatan pelabuhan perikanan diantaranya adalah memberikan keuntungan bagi pihak pengelola maupun pemilik pelabuhan perikanan atau minimum pendapatan pelabuhan seimbang dengan biaya pengoperasiannya. pelabuhan perikanan dapat memberikan suatu nilai atau harga ikan yang layak pada nelayan dan pedagang karena adanya aktivitas pelelangan ikan, sedangkan bagi pengelola, adanya fasilitas pengelola bermanfaat untuk menunjang aktivitasnya. selain itu, nelayan dan pedagang dari pada dibeli dari luar pelabuhan perikanan, juga memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan yang diolah dan dikemas dengan baik.

Tingkat pemanfaatan serta pelaksanaan fungsi pelabuhan berdasarkan literatur yang ada yakni Lubis (2005) dibagi berdasarkan kelompok kepentingan yaitu fungsi maritim, fungsi komersial, dan fungsi jasa. berdasarkan pengamatan langsung fungsi maritim tidak terjadi disana dikarenakan tidak ada kontak nelayan dengan pemilik kapal, dimana pemilik kapal yang secara langsung mengoperasikan kapalnya. sedangkan fungsi komersial terlaksana di PPI dengan baik, karena terjadi proses distribusi perikanan atau jual beli antara masyarakat dengan pedagang ikan melalui transaksi

yang terjadi di TPI. Dan untuk fungsi jasa tidak terlaksana secara maksimal hal ini di karenakan tidak adanya jasa penanganan mutu ikan, sedangkan untuk jasa pendaratan ikan dan jasa kapal penangkapan ikan sudah terlaksana (Arsyad, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perikanan pasal 41, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusi. Salah satu upaya pengoperasionalan pelabuhan perikanan adalah pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan (*central marker*), ditempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen/nelayan dengan konsumen/pembeli Oleh karena itu, dalam suatu kompleks pelabuhan perikanan, fasilitas utama selain pembangunan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengelolaan dan pemasaran.

Menurut Merdekawati (2019), tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pokok di PPI Lonrae yaitu tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 108%, maka perlu diperpanjang karena kebutuhan dermaga saat ini 160,71 m. Tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan sebesar 45,5%, maka belum perlu dilakukan pengembangan. Tingkat kebutuhan pada kedalaman perairan lebih dalam dari kedalaman perairan saat ini, maka perlu dilakukan penambahan, karena kebutuhan kedalaman perairan saat ini 3 m. Tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan sebesar 26% maka belum perlu dilakukan pengembangan.

Menurut Arsyad (2012), tingkat pemanfaatan dan pelaksanaan fungsi pelabuhan pada beberapa fasilitas yang ada di PPI Boneherlang adalah tingkat pemanfaatan dermaga 71,84 %, tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan 54%, tingkat pemanfaatan kedalaman perairan 94,44%, tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan 49,999%, tingkat pemanfaatan gedung pelelangan 349%, tingkat pemanfaatan semua fasilitas di PPI Boneherlang 49%.

Menurut Darma (2020) fasilitas pokok yang ada di PPI Birea terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, kedalaman perairan, pemecah gelombang dan daratan pelabuhan. Tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pokok di PPI Birea yaitu tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 90,5%, kolam pelabuhan sebesar 72,5%, daratan pelabuhan 86,9%, dan tingkat pemanfaatan kedalaman perairan sebesar 66,6%, masih dibutuhkan kedalaman perairan dua meter